

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Hizbut Tahrir (HT) yang berarti partai pembebasan dalam bahasa arab merupakan organisasi Pan-Islamis dengan gagasan *Khilafah Al-Islamiah*<sup>1</sup> yang didirikan di Palestina pada 1953 oleh Taqi al-Din al-Nabhani.<sup>2</sup> Hizbut Tahrir mulai masuk ke Indonesia pada dekade 1980-an lewat Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman Al-Baghdadi kemudian berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus dari Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor, dan mulai mendiskusikan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dengan membentuk halaqoh-halaqoh (pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan Hizbut Tahrir. Gagasan tersebut kemudian disebarkan keberbagai kampus di Indonesia lewat Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Satu dekade kemudian tepatnya pada dekade 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir mulai disampaikan kepada masyarakat umum. Pertama penyampaian dakwah dilakukan kepada orang tua mahasiswa. Tahap kedua, pasca kelulusan mahasiswa yang aktif dalam lembaga dakwah kampus tersebut, maka aktivitas dakwah mulai bergerak keranah yang lebih luas (perkantoran, pabrik, hingga perumahan). Dakwah ini dilakukan hingga tahun 2000-an. Dakwah Hizbut Tahrir semakin mendapat angin segar seiring berubahnya iklim politik di Indonesia. Pada maret 2002 untuk pertama kalinya diadakan Konferensi Internasional Khilafah Islam di ISTORA Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun nasional. Konferensi ini juga menjadi tanda lahirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan sejak saat itu mulai memproklamkan diri sebagai organisasi politik yang berideologikan Islam (*Ali*,

---

<sup>1</sup> Pemikiran untuk mencipta ulang negara islam. Dengan adanya negara islam kaum muslimin dapat membebaskan diri dari pengaruh buruk penjajahan politik dan budaya

<sup>2</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori, 1985, *Muslim Politics*, Princenton Univercity press.

2012:80). Walaupun baru pada tahun 2006 HTI secara resmi tercatat sebagai organisasi sosial keagamaan di Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 44/D.III.2/VI/2006.

Selama ini HTI secara umum dikenal sebagai Organisasi yang menyerukan upaya Pendirian Negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia. Di lapangan, HTI kerap menunjukkan dukungannya terhadap perilaku intoleransi beragama terhadap kelompok minoritas lainnya, namun belum pernah ada catatan yang menunjukkan adanya tindakan HTI yang pernah diproses secara hukum pidana yang ada.<sup>3</sup>

Dalam perjalanannya ide-ide dakwah Hizbut Tahrir tidak selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat. ada juga yang dengan keras menolak ide-ide HTI seperti NU misalnya yang dalam berbagai kesempatan seringkali bersebrangan dengan HTI. Penolakan ini terjadi karena dalam pandangan NU gagasan yang diusung HTI bertentangan dengan semangat kebangsaan yang selama ini diperjuangkan oleh NU . HTI berpandangan bahwa nasionalisme merupakan bentuk fanatisme kebangsaan yang merupakan bagian dari bentuk *ashabiyah*<sup>4</sup>. Melakukan upacara, hormat pada bendera dan menyanyikan lagu indonesia raya menurut HTI merupakan contoh praksis dari *ashabiyah*. Karena hal itu dianggap sebagai sarana atau jalan untuk menyerukan dan menanamkan paham nasionalisme.

HTI juga seringkali menyuarakan penolakannya terhadap sistem demokrasi yang dianut indonesia. Penolakan HTI terhadap demokrasi menurut juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, terletak pada jargonnya yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Salah satu kedaulatan rakyat itu adalah berhak membuat hukum melalui sistem perwakilan. Ismail menegaskan hal itu bertentangan 180 derajat dengan ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam,

---

<sup>3</sup> <https://www.amnestyindonesia.org/dampak-buruk-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia-hti-sebagai-ekses-dari-perpu-no-2-tahun-2017-tentang-organisasi-sipil-kemasyarakatan>

<sup>4</sup> *Ashabiyah dimaknai oleh HTI sebagai ajakan untuk membela orang atau kelompok, tanpa melihat apakah orang atau kelompok tersebut benar atau salah; juga bukan untuk membela Islam, atau menjunjung tinggi kalimat Allah, melainkan karena dorongan marah dan hawa nafsu*

menurut HTI kedaulatan menerbitkan hukum ada di tangan Allah SWT.<sup>5</sup> Dalam berbagai Aksinya HTI seringkali menyerukan agar umat Islam berhenti mendukung demokrasi. Dalam pandangan HTI Indonesia bukanlah negara demokrasi, bahkan dalam konstitusi dan Pancasila sekalipun tidak pernah disebutkan. demokrasi adalah sistem yang tiba-tiba muncul begitu saja dalam pemerintahan. Lebih jauh HTI beranggapan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang berasal dari islam. Sistem yang benar adalah menegakkan syari'ah dan Khilafah Islamiyyah.

Bukan hanya dari kalangan NU saja, gagasan HTI tentang Khilafah Islamiyah juga mendapatkan respon yang kurang positif dari masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari hasil Survey yang dilakukan Syaiful Mujani Riset Center (SMRC) pada periode Mei 2017. Temuan survey ini mendapati 28,2% warga yang pernah mendengar HTI, 56,7% mengetahui HTI membawa gagasan khilafah untuk diperjuangkan. 68,8% warga menyampaikan penolakan terhadap perjuangan HTI. Sementara dari 75,4% yang mengetahui niat pemerintah membubarkan HTI, 78,4% menyetujuinya.<sup>6</sup>

Puncaknya pada 17 juli 2017 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) secara resmi mencabut status badan hukum organisasi HTI yang berujung pada pembubaran organisasi tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah ada lima poin yang menyebabkan Organisasi HTI dibubarkan.

1. Pertama : Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
2. Kedua : Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

---

<sup>5</sup> Lebih jelas baca: [news.metrotvnews.com/politik/nbw11PjK-alasan-hti-tak-setuju-demokrasi](http://news.metrotvnews.com/politik/nbw11PjK-alasan-hti-tak-setuju-demokrasi)

<sup>6</sup> Baca: <http://saifulmujani.com/blog/2017/06/04/rakyat-indonesia-menolak-khilafah-isis-dan-hti>

3. Ketiga : Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4. Keempat: Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
5. Kelima : Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

Pembubaran terhadap Organisasi Hizbut Tahrir tidak hanya terjadi di Indonesia. Setidaknya ada 45 negara yang telah melarang organisasi hizbut tahrir dengan berbagai macam alasan. Malaysia merupakan salah satu negara yang telah lebih dulu melarang organisasi HT yakni pada 17 september 2015 melalui Lembaga Fatwa Negara bagian Selangor HT dilarang karena dianggap sebagai organisasi yang menyimpang.

Pembubaran ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak, tanggapan tersebut terutama pada kekhawatiran adanya permusuhan dan kekerasan atas kelompok tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Amnesty Indonesia Selain ketakutan paling tidak terdapat tiga dampak buruk yang perlu diperhatikan.<sup>7</sup> yaitu :

1. Terjadinya aksi pembersihan yang berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan untuk berekspresi. Hal ini sudah dimulai oleh Kementerian riset dan teknologi, dan pendidikan tinggi pada juli 2017 lalu yang meminta setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk keluar dari HTI jika ingin tetap menjadi PNS.
2. Negara berpotensi melakukan pengawasan berlebihan yang dapat melanggar hak privasi dan norma hukum yang berlaku. Hal ini

---

<sup>7</sup> Lebih lengkap baca: <https://www.amnestyindonesia.org/dampak-buruk-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia-hti-sebagai-ekses-dari-perpu-no-2-tahun-2017-tentang-organisasi-sipil-kemasyarakatan>

dimungkinkan dengan kebijakan kepolisian di daerah-daerah untuk mengawasi aktifitas anggota dan simpatisan HTI.

3. Pembubaran ormas HTI lewat PERPU ini juga berpotensi membawa dampak buruk pada upaya deradikalisasi. Pemerintah luput memandang HTI sebagai organisasi tunggal tanpa menimpak adanya Tarik-menarik antar faksi konservatif dan radikal. Dengan dibubarkannya HTI kemungkinan kelompok konservatif untuk masuk dalam gerakan bawah tanah kelompok radikal menjadi sangat besar dan akan semakin sulit diawasi.

Dalam masyarakat juga berkembang apa yang disebut *prejudice*<sup>8</sup> (Rothenberg, 1992). *Prejudice* atau prasangka ini mengakibatkan obyek tertentu mendapat perlakuan tidak adil. Bahkan tak jarang menjadi korban kejahatan dikarenakan kebencian. Obyek yang dibenci bukanlah mereka yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang merugikan masyarakat, namun lebih didasarkan pada rasa tidak suka dan prasangka-prasangka karena keanggotaan seseorang atas kelompok tertentu. Selama ini HTI menjadi bagian dari kelompok yang menjadi korban dari *hate crime* ini. Perbedaan pandangan ke-agamaan dan kenegaraan yang mereka miliki memosisikan mereka pada golongan kelas “dua”. Hak-hak mereka sering tidak terakomodasi. Ada label-label negatif yang dilekatkan pada kelompok ini. antarlain, Ormas radikal, Anti-Pancasila, makar, sesat, dan lain sebagainya, yang beberapa di antaranya bisa jadi hanya bersifat prasangka saja.

Dengan banyaknya resistensi dan stigmatisasi atas HTI pasca pembubarannya Oleh pemerintah. Organisasi HTI sebagai bagian dari masyarakat tentu perlu melakukan Renegosiasi Identitas, sehingga memungkinkan HTI beserta gagasannya dapat diterima oleh masyarakat dominan.

## **I.2. Fokus Penelitian**

Melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, Pembubaran yang dilakukan Oleh Pemerintah atas HTI memberikan dampak yang signifikan dalam

---

<sup>8</sup>*ketidaksukaan yang irrasional, kecurigaan, atau kebencian atas kelompok, ras, agama, atau orientasi seksual*

upaya menyebarkan gagasannya kepada masyarakat, adanya stigma negative (Radikal, Anti Pancasila) yang disematkan kepada HTI dan pelarangan atas kegiatan dengan menggunakan simbol-simbol HTI seperti yang selama ini dilakukan tentu semakin menyempitkan ruang gerak dan proses negosiasi identitas mereka. Oleh karena itu penulis mencari jawaban atas pertanyaan pokok sebagai berikut: Bagaimana HTI melakukan renegotiasi identitas kepada masyarakat dominan pasca pemburanya tersebut?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Renegosiasi Identitas HTI pasca pencabutan status badan hukum oleh pemerintah ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pemaknaan dan pengalaman HTI atas identitasnya pasca pencabutan status badan hukumnya oleh pemerintah Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana HTI sebagai kelompok Co Cultural melakukan renegotiasi identitas pasca pembubaran organisasinya.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi peneliti lain untuk melakukan penelitian terutama dalam kajian tentang renegotiasi identitas. Serta untuk mengaplikasikan beberapa teori yang telah diperoleh selama berada pada proses pembelajaran atau perkuliahan.

#### **I.4.2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada Masyarakat Umum, kelompok dan lembaga terkait tentang bagaimana proses renegotiasi identitas yang dilakukan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

## **I.5. Tinjauan Pustaka**

### **I.5.1. Studi Terdahulu**

Penelitian tentang HTI telah banyak dilakukan diantaranya oleh Sisca (2016). Penelitian yang dilakukan berjudul *Negosiasi Identitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Mengkomunikasikan Gagasan Alternatifnya kepada Kelompok Mayoritas*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa Fase yang dilakukan oleh HTI untuk menegosiasikan identitasnya di antaranya pertama: Fase I (menjaga jarak) interaksi komunikasi yang berlangsung dengan anggota kelompok mayoritas bermotif separasi ketidaktegasan. Pada fase ini berlangsung dalam aktivitas sehari-hari. Fase II (pengenalan) penerapan dari sistem pembinaan ke luar, bermotif separasi tegas yang menciptakan *knowledge*. Fase II dibagi menjadi subfase pengenalan general dan subfase pengenalan lanjutan (transisi). Keduanya dibedakan berdasarkan metodenya. Subfase pengenalan general menggunakan metode yang pengkajian aplikatif dalam bentuk komunikasi satu arah. Subfase pengenalan lanjutan (transisi) menggunakan metode pengkajian aplikatif dalam bentuk komunikasi dua arah. Fase III (penanaman dan transformasi) penerapan dari sistem pembinaan ke dalam, bermotif separasi agresif yang menciptakan *knowledge*, *mindfulness*, dan *skill* dengan metode *halaqah*. Pada fase ini individu dari kelompok mayoritas mengalami transformasi ideologi dan status sosial. Individu yang memiliki kompetensi dapat pula merangkap peran dalam fase ini, selain menjadi daris/ darisah, individu tersebut dapat menjadi musrif/ musrifah untuk individu yang lebih awam mengenai gagasan alternatif HTI.

Interaksi komunikasi yang dilakukan para aktivis HTI kepada kelompok mayoritas terhadap gagasan alternatif HTI merupakan bentuk negosiasi identitas kultural yang dipengaruhi oleh tujuan separasi dalam berkomunikasi. Secara spesifik aksi separasi yang dilakukan HTI meliputi sifat tegas (*assertive*), agresif (*aggressive*), dan ketidaktegasan (*nonassertive*). Interaksi komunikasi negosiasi identitas dengan tujuan tersebut dilakukan para aktivis dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*), kecakapan (*skill*), dan kesadaran (*mindfulness*) terhadap identitas kebudayaan HTI yang diperoleh sejak menjadi murid (daris/ darisah) HTI. Ketiga

komponen negosiasi identitas tersebut digunakan oleh para aktivis untuk pembentukan persepsi baru anggota kelompok mayoritas.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa negosiasi identitas yang dilakukan HTI bertujuan Sparasi, yaitu menolak untuk membuat ikatan bersama dengan kelompok dominan. Negosiasi dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur melalui beberapa fase. Penelitian yang dilakukan Sisca, (2016) menggunakan metode Fenomenologi.

Selain penelitian diatas terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Atiyah, (2016) yang berjudul Representasi identitas Komunitas Hizbut Tahrir Indonesia Melalui media sosial Facebook. Pada penelitian ini dijelaskan adanya identitas ganda yang digunakan oleh HTI di akun Facebook mereka. Pertama Identitas HTI yang menolak demokrasi dan berusaha membentuk negara Islam. Identitas kedua adalah sebagai warga negara yang mengikuti tata cara pemerintahan di Indonesia.

Penelitian tentang renegosiasi identitas pernah dilakukan pula oleh Riki van Boeschoten (2014) penelitian ini memaparkan tentang renegosiasi identitas gender imigran dari Albania dan Bulgaria yang ada di Yunani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengungkap tiga teori yaitu renegosiasi, *transnasional Mobility* dan *bargaining with patriarchy*. Penelitian renegosiasi identitas sebelumnya juga dilakukan oleh Mardiansyah (2013) tentang negosiasi identitas pada komunitas punk muslim di daerah Pulogadung Jakarta. Penelitian lain juga dilakukan oleh Mahmuda (2018) dengan judul Suami TKW yang mengurus Rumah Sebuah studi tentang Renegosiasi Identitas Laki-laki pada kaum Patriarkah.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti memusatkan perhatian pada renegosiasi identitas HTI pasca organisasi tersebut dibubarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan karena pasca pencabutan status badan hukum organisasi HTI oleh pemerintah aktivitas HTI masih terus berlangsung walaupun tanpa menggunakan embel-embel atau atribut HTI dalam kegiatannya.



Tabel I.1

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Lokasi	Metode	Teori	Hasil
1	Shintaloka Pradita Sisca (2016)	Negosiasi Identitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Mengkomunikasikan Gagasan Alternatifnya kepada Kelompok Mayoritas		Fenomenologi	Identitas (Mead) Interaksionisme Simbolik	Interaksi komunikasi yang dilakukan para aktivis HTI kepada kelompok mayoritas terhadap gagasan alternatif HTI merupakan bentuk negosiasi identitas kultural yang dipengurahi oleh tujuan separasi dalam berkomunikasi
2	Robiatul Atiyah (2016)	Representasi identitas Komunitas Hizbut Tahrir Indonesia Melalui media sosial Facebook		Kualitatif	Teori identitas, Teori pengungkapan diri (Joseph A. Devito)	adanya identitas ganda yang digunakan oleh HTI di akun Facebook mereka. Pertama Identitas HTI yang menolak demokrasi dan berusaha membentuk negara Islam. Identitas kedua adalah sebagai warga negara

						yang mengikuti tata cara pemerintahan di Indonesia.
3	Mardiansyah, M. R. (2013)	Memahami pengalaman negosiasi Identitas kelompok Punk Muslim didalam masyarakat dominan	Pulogadung Jakarta Timur	Kualitatif	Cross-cultural-face-negotiation-theory (Thommey)	Identitas komunitas punk muslim tidak mereka tunjukan melalui atribut-atribut khusus yang mereka kenakan. Komunitas punk muslim cenderung bersikap layaknya masyarakat biasa dengan cara berperilaku sopan, serba hitam seperti komunitas punk pada umumnya.
4.	Mahmuda (2018)	Suami TKW yang mengurus Rumah Sebuah studi tentang Renegosiasi Identitas Laki-laki pada kaum Patriarkakh.	Surabaya	Kualitatif	Identitas (Mead) Interaksionisme Simbolik	Sumi mengalami dilemma dengan identitas barunya, beban dan tanggung jawab lebih besar daripada istri yang ada dirumah, suami menjadi satu-satunya yang memiliki tanggung jawab atas urusan domestic dan juga public.

### **I.5.2. Teori Identitas**

Identitas merupakan salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Identitas menjadi menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi manusia. Stella Ting-Tommey (2015) mendefinisikan identitas sebagai konstruksi individu dalam aspek etnis, agama, gender, orientasi seksual, profesi, peran sosial, citra diri yang berasal dari refleksi diri dan konstruksi sosial yang berlaku dalam lingkungannya.

Identitas seseorang bukan sesuatu yang permanen melainkan akan berubah seiring proses interaksi yang dilakukannya dengan masyarakat. Identitas juga merupakan aspek yang sarat akan makna dan terkonstruksi secara sosiologis. Pendekatan sosiologis terhadap Self dan Identity menurut Sheldon Stryker dimulai dari asumsi bahwa ada hubungan yang bersifat resiprokal antara diri (self) dan masyarakat.<sup>9</sup> Diri mempengaruhi masyarakat dengan tindakan individu sehingga menciptakan kelompok, organisasi jaringan dan lembaga. Dan secara resiprokal masyarakat mempengaruhi diri (self) melalui bahasa dan makna bersama yang memungkinkan seseorang untuk mengambil peran yang lain, terlibat dalam interaksi sosial dan merefleksikan dirinya sebagai objek. Proses terakhir dari refleksifitas merupakan inti kedirian (selfhood) (McCall & Simmons, 1978; Mead, 1934).<sup>10</sup> Karena diri muncul dan mencerminkan masyarakat, pendekatan sosiologis untuk memahami diri dan bagian-bagiannya (Identitas) berarti bahwa kita juga harus memahami masyarakat di mana diri bertindak, dan perlu diingat bahwa diri selalu bertindak dalam konteks sosial di mana diri lain ada (Stryker, 1980).<sup>11</sup>

### **I.5.3. Negosiasi Identitas**

Teori negosiasi identitas berakar dari pemikiran Goffman (1959) tentang bagaimana masyarakat memaksa seseorang untuk menghadirkan suatu citra diri tertentu. Lebih lanjut Swann (1987) menjelaskan tentang hubungan antara dua proses interaksi sosial yaitu behavioral confirmation dan self verification. Teori ini kemudian dilanjutkan dan oleh Ting-Toomey (1999).<sup>12</sup> Negosiasi identitas diartikan sebagai situasi interaksi interaksional dimana individu dalam situasi

---

<sup>9</sup> Jan E. Stets and Peter J. Burke, *A Sociological Approach to Self and Identity*, Journal, Washington: Washington State University, 2003, hlm.1.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Janet M Bennet, *The SAGE Encyclopedia of Intercultural Competence*, Los Angeles: SAGE Publication, 2015, hlm 420.

antar budaya mencoba untuk mengubah, menantang atau mendukung citra diri sesuai apa yang individu inginkan, atau sesuai dengan lingkungan.<sup>13</sup>

Stella Ting-Toomey berpendapat, Bahwa suatu konsep diri atau identitas dipandang sebagai mekanisme proses komunikasi antar budaya. jadi negosiasi dapat mempengaruhi suatu identitas seseorang. dalam memberikan tanggapan proses negosiasi, manusia menunjukkan dua sikap. Yaitu, *mindfulness* dan *mindless*.

*Mindfulness* mengkonsepsikan pengembangan kesadaran budaya, pengetahuan budaya dan respon interpersonal untuk mengembangkan keanggotaan dan identitas personal.<sup>14</sup> Artinya manusia menerima dan ingin menjadikan dirinya seperti yang diinginkan lingkungan dia berada.

Sebaliknya *mindlessness* adalah ketergantungan yang amat besar pada kerangka referensi yang familiar, kategori dan desain yang rutin dan cara-cara melakukan segala hal yang telah menjadi kebiasaan.<sup>15</sup> Ketergantungan ini mengakibatkan manusia menolak atau masa bodoh terhadap lingkungannya, sehingga mempertahankan identitasnya sendiri.

Teori Negosiasi identitas berpandangan bahwa manusia dalam setiap kebudayaan mempunyai keinginan untuk menegaskan identitas positif dalam berbagai situasi komunikasi. Namun, apa yang merupakan cara yang tepat untuk menunjukkan identitas penegasan dan pertimbangan bervariasi dari satu konteks budaya satu ke budaya yang berikutnya. Teori negosiasi identitas menekankan domain identitas tertentu dalam mempengaruhi interaksi sehari-hari individu.

Lebih lanjut, Ting-Toomey menjelaskan Negosiasi identitas memiliki 10 asumsi.<sup>16</sup>

1. Identitas keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok dan identitas pribadi terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lain.
2. Orang-orang dalam semua budaya atau kelompok memiliki kebutuhan dasar akan motivasi untuk memperoleh kenyamanan identitas,

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid. hlm, 423

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid. hlm 421-422

kepercayaan, keterlibatan, koneksi dan stabilitas baik level identitas berdasarkan individu maupun kelompok.

3. Setiap orang akan cenderung mengalami kenyamanan identitas dengan lingkungan budaya yang familiar baginya dan sebaliknya akan mengalami identitas yang rentan dalam suatu lingkungan yang baru.
4. Setiap orang cenderung percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki kebudayaan yang sama dengan dirinya dan juga sebaliknya
5. Seseorang akan cenderung merasa menjadi bagian dari kelompok bila identitas keanggotaan dari kelompok yang diharapkan memberi respon yang positif. Sebaliknya akan merasa berbeda/asing saat identitas keanggotaan kelompok yang diinginkan memberi respon yang negatif.
6. Individu cenderung mengalami interaksi yang sama ketika sedang berkomunikasi dengan budaya yang dapat diprediksi. Namun berbeda ketika berkomunikasi dengan budaya lainnya yang asing. Sehingga Identitas yang dapat diprediksi mudah untuk dipercaya, dan identitas yang tidak diprediksi mengarah ke ketidakpercayaan. Memunculkan bias atribut antar kelompok.
7. Orang akan memperoleh kestabilan identitas dalam situasi budaya yang familiar dan akan menemukan perubahan identitas atau goncang dalam situasi-situasi budaya yang tidak familiar sebelumnya.
8. Dimensi budaya, personal dan keragaman situasi mempengaruhi makna, interpretasi, dan penilaian terhadap tema-tema atau isu-isu identitas tersebut.
9. Komunikasi antarbudaya yang *mindful* menekankan pentingnya pengintegrasian pengetahuan antarbudaya, motivasi, dan ketrampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, tepat, dan efektif.
10. Kepuasan hasil dari negosiasi identitas meliputi rasa dimengerti, dihargai dan dihormati.

#### **I.5.4. Interaksionisme Simbolik**

Interaksionisme Simbolik pertama kali dirumuskan oleh Herbert Mead seorang sosiolog dari Chicago pada tahun 1920-an. Gagasan Mead tentang Interaksionisme Simbolik berkembang dengan pesat, terutama setelah diterbitkannya buku *Mind, Self, and Society* (1934) yang kemudian menjadi rujukan utama teori ini. Istilah “Interaksionisme Simbolik” sendiri sebenarnya diciptakan oleh Herbert Blumer yang merupakan mahasiswa Mead di Universitas Chicago pada tahun (1937).<sup>17</sup>

Teori Interaksionisme Simbolik menerangkan bahwa manusia dalam kaitannya dengan interaksi baik secara individu maupun kelompok selalu menggunakan simbol-simbol. Secara sederhana teori ini didasarkan atas tiga premis. Pertama, manusia dalam kaitannya dengan interaksi merespon situasi simbolik. Artinya mereka merespon dunia sosial berdasarkan makna yang terkandung dalam situasi tersebut bagi mereka. Kedua, makna merupakan hasil dari interaksi sosial. Yang berarti bahwa makna bukanlah sesuatu yang melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui bahasa. Ketiga, makna dengan demikian akan selalu berubah sejalan dengan proses interaksi yang berlangsung dalam situasi sosial tertentu. Kenyataan sosial dalam pandangan teori ini didasarkan atas definisi subjektif tiap-tiap individu. Struktur sosial misalnya merupakan definisi bersama yang dimiliki individu berhubungan dengan suatu kecocokan yang menghubungkannya dengan yang lain. Tindakan dan interaksi individu dipengaruhi oleh definisi bersama ini dan dikonstruksikan melalui interaksi sosial.

Larossa dan Reitzes (1993) mengemukakan tiga tema dasar dalam teori Interaksionisme Simbolik.

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia
  - a. Manusia bertindak terhadap yang lain berdasarkan makna-makna yang dinyatakan orang lain terhadap dirinya
  - b. Makna tersebut dihasilkan dari interaksi sosial manusia satu dengan yang lain.

---

<sup>17</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada Karya, 2001, hlm. 68

- c. Makna-makna tersebut di ubah dan disempurnakan melalui proses interaksi
- 2. Pentingnya Konsep mengenai Diri
  - a. Seseorang mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan yang lain
  - b. Konsep diri memberikan Motif penting untuk berperilaku
- 3. Hubungan antara Individu dan kelompok
  - a. Individu dan atau kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial
  - b. Struktur sosial dihasilkan melalui proses interaksi

Dalam Interaksionisme Simbolik masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya melainkan bentukan dari proses interaksi sosial. Menurut Blumer perspektif interaksionalisme simbolik memiliki suatu yang khas. Ke khasan tersebut ditunjukkan dengan adanya pembatasan-pembatasan tindakan atas dasar interpretasi mereka terhadap sesuatu. manusia tidak langsung memberikan respon yang spontan terhadap tindakan orang lain, tetapi digerakkan oleh pemaknaan atas tindakan tersebut. Pemaknaan yang mereka berikan terhadap orang lain, situasi sosial, dan bahkan diri mereka sendiri adalah yang mendasari tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks ini makna dikonstruksi oleh proses interaksi sosial, yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain. Mead mengemukakan tiga konsep inti yang menjadi dasar teori Interaksionisme Simbolik. Pikiran (*Mind*), Interaksi sosial (*Diri/Self*), Masyarakat (*Society*). Pikiran dan Interaksi sosial digunakan untuk manafsirkan dan mencocoknya dengan Masyarakat.

### **Pikiran (*Mind*)**

Mead berpandangan bahwa pikiran merupakan fenomena sosial yang berada diluar diri manusia. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses interaksi sosial, dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Interaksi sosial selalu terdapat stimulus dan respon, namun dalam melakukan respon seseorang selalu melibatkan pikiran, yang artinya antara stimulus dan respon terdapat proses pemaknaan yang dilakukan oleh pikiran, sehingga seseorang mempunyai lebih

dari satu respon untuk tiap stimulus yang diterima dirinya. Mead juga mengungkapkan bahwa *Mind* melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah.<sup>18</sup>

### **Diri (*Self*)**

Dalam banyak gagasan yang dikemukakan oleh Mead dan terutama gagasannya tentang pikiran melibatkan apa yang disebut sebagai konsep diri. Gagasan Mead terutama berfokus pada perbedaan antara “*I*” diri sebagai subjek yang non reflektif dan “*Me*” diri sebagai objek yang reflektif. *Diri* pada dasarnya merupakan gagasan untuk menerima diri sendiri sebagai objek, sehingga pada umumnya seseorang bertindak berdasarkan “*Me*” diri sebagai objek. Seseorang bertindak berdasarkan Norma dan ekspektasi orang lain, Namun dalam bertindak seseorang tidak selalu didorong oleh “*Me*” namun juga “*I*” yang juga dapat mendorong suatu tindakan walaupun bersifat spontan sehingga tidak mempertimbangkan respon atau pandangan orang lain terhadap tindakan tersebut.

Diri (*self*) berhubungan secara dialektis dengan pikiran (*Mind*). Artinya, di satu sisi Mead bahwa tubuh akan menjadi diri bila pikiran telah berkembang. Di sisi lain, diri dan refleksitas adalah penting bagi perkembangan pikiran. Memang mustahil untuk memisahkan pikiran dan diri karena diri adalah proses mental. Tetapi, meskipun kita membayangkannya sebagai proses mental, diri adalah sebuah proses sosial. Dalam pembahasan mengenai diri, Mead menolak gagasan yang meletakkannya dalam kesadaran dan sebaliknya meletakkannya dalam pengalaman sosial dan proses sosial. Seperti dikatakan Mead :

“Dengan cara merefleksikan, dengan mengembalikan pengalaman individu pada dirinya sendiri keseluruhan proses sosial menghasilkan pengalaman individu yang terlibat di dalamnya; dengan cara demikian, individu bisa menerima sikap orang lain terhadap dirinya, individu secara sadar mampu menyesuaikan dirinya sendiri terhadap proses sosial dan mampu mengubah proses yang dihasilkan dalam tindakan sosial tertentu dilihat dari sudut penyesuaian dirinya terhadap tindakan sosial itu”

---

<sup>18</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 280



Diri juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain. Artinya, seseorang menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan apa yang akan dikatakan selanjutnya.

Untuk dapat mempunyai *Self*, seseorang harus mampu mencapai keadaan “di luar dirinya sendiri” sehingga mampu mengadakan evaluasi terhadap dirinya, dan dapat menjadi objek bagi dirinya. Untuk dapat melakukan itu, seseorang pada hakikatnya harus memposisikan dirinya dalam taraf pengalaman yang sama dengan orang lain. Tiap individu merupakan bagian penting dari situasi yang dialami bersama dan tiap individu harus memahami dirinya agar mampu bertindak rasional dalam situasi tertentu. Dalam bertindak rasional ini mereka mencoba memeriksa diri sendiri secara impersonal, objektif, dan tanpa emosi. Tetapi, seseorang tidak dapat mengalami diri sendiri secara langsung. Mereka hanya dapat melakukannya secara tak langsung melalui penempatan diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain itu. Dari sudut pandang demikian orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Seperti dikatakan Mead, hanya dengan mengambil peran orang lainlah kita mampu kembali ke diri kita sendiri.<sup>19</sup>

### **Masyarakat (*Society*)**

Secara umum dalam kajian Mead masyarakat tidak lebih semacam organisasi sosial dimana pikiran dan diri muncul dan berkembang.<sup>20</sup> Pada tingkat masyarakat yang lebih khusus, Mead mengemukakan pemikiran tentang pranata sosial (*social institutions*). Mead mendefinisikan pranata sebagai “tanggapan bersama dalam komunitas” atau “kebiasaan hidup komunitas”. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa, keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu menurut cara yang sama, berdasarkan kondisi itu juga, terdapat respon yang seragam dari komunitas. Proses ini disebut “pembentukan pranata”.

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 280-282

<sup>20</sup> Bryan S. Turner, *Teori sosial dari Klasik sampai Posmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 349

Pendidikan adalah proses internalisasi kebiasaan bersama komunitas ke dalam diri aktor. Pendidikan adalah proses yang esensial karena menurut pandangan Mead, aktor tidak mempunyai diri dan belum menjadi anggota komunitas sesungguhnya, sehingga mereka tidak mampu menanggapi diri mereka sendiri seperti yang dilakukan komunitas. Untuk berbuat demikian, aktor harus menginternalisasikan sikap bersama komunitas.

Namun, Mead dengan hati-hati mengemukakan bahwa pranata tak selalu menghancurkan individualitas atau melumpuhkan kreativitas. Mead mengakui adanya pranata sosial yang “menindas, stereotip, ultrakonservatif” yakni, yang dengan kekakuan, ketidaklenturan, dan ketidakprogesifannya menghancurkan atau melenyapkan individualitas. Menurut Mead, pranata sosial seharusnya hanya menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan individu dalam pengertian yang sangat luas dan umum saja, dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup bagi individualitas dan kreativitas.<sup>21</sup> Di sini Mead menunjukkan konsep pranata sosial yang sangat modern, baik sebagai pemaksa individu maupun sebagai yang memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang kreatif.

### **1.5.5. *Co – Culture Theory***

*Co – Culture Theory* merupakan teori yang dikembangkan oleh Mark P. Orbe, merupakan teori interaksi yang terjadi antara minoritas yang terpinggirkan dengan kelompok dominan.<sup>22</sup> Teori ini peneliti gunakan untuk menjelaskan interaksi dari kelompok yang terpinggirkan oleh masyarakat. Masyarakat dominan cenderung melakukan peminggiran terhadap suatu kelompok, karena suatu sebab keunikan, perbedaan atau sesuatu yang dianggap aneh dan tidak sesuai dengan norma dan budaya kelompok dominan.

Interaksi dilakukan oleh *Co-Culture* dengan tujuan untuk mencapai salah satu dari tiga hal yang ingin dicapai oleh kelompok dominan. Yaitu, Asimilasi, akomodasi, dan pemisahan atau separasi. Agar dapat mencapai tujuan ini Co-

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm 287-288

<sup>22</sup> Mark P. Orbe dalam Gudykunst, William B. Gudykunst & Bella Mody, *Handbook of International and Intercultural Communication*, Second Edition, Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc., 2002, hlm.190

Culture menggunakan tiga pendekatan. *Nonassertive* (tidak tegas), *Assertive* (tegas), dan *Agresif*.<sup>23</sup> Ketiga pendekatan ini digunakan dalam proses interaksinya dengan masyarakat.

## **I.6. Metode Penelitian**

### **I.6.1. Paradigma Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami renegotiasi identitas HTI. Lebih jauh lagi, untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk renegotiasi identitas yang dilakukan HTI. Semua pertanyaan dalam studi ini dapat ditemukan jawabannya melalui paradigma definisi sosial atau paradigma deskriptif yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan perilaku kehidupan manusia secara individu maupun manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya.

### **I.6.2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan memusatkan perhatiannya terhadap gambaran yang lengkap tentang fenomena yang diteliti. Sedangkan pendekatan etnografi digunakan dalam penelitian ini dalam rangka untuk menggali lebih dalam dan mengulas proses renegotiasi identitas yang dilakukan HTI. data yang dikumpulkan dengan metode etnografi dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, data *emic*, yaitu informasi yang diberikan oleh informan secara langsung. Kedua, data *etic*, informasi yang merupakan hasil interpretasi peneliti sesuai dengan sudut pandang informan. Ketiga, data *Negosiasi*, yaitu informasi yang disetujui oleh peneliti dan informan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>24</sup> Data tersebut digunakan peneliti untuk mengkaji komponen interaksi, bahasa, budaya serta menempatkan permasalahan itu dalam konteks lebih luas.

---

<sup>23</sup> Lebih jelas baca William B. Gudykunst, *theorizing About Intercultural Communication*, California: Sage Publications, Inc. 2005, hlm. 174-179.

<sup>24</sup> Jhon W Cresswell, *Eduactional Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Ney Jersey: Person Education, Inc, 2012. Hlm. 471

### **I.6.3. Setting Sosial**

Pada penelitian ini setting sosial yang digunakan oleh peneliti adalah kondisi pasca pembubaran organisasi HTI. dimana pasca pembubaran tersebut segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang untuk diadakan.

### **I.6.4. Penentuan Informan**

Karena penelitian ini berusaha untuk lebih memahami renegotiasi identitas HTI pasca pencabutan status badan hukumnya oleh pemerintah Indonesia maka pada penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik purposive. Peneliti menetapkan kriteria yang harus terpenuhi oleh informan. Kriteria ini adalah sebagai berikut :

1. Informan merupakan simpatisan, anggota, atau pengurus HTI.
2. Informan minimal harus aktif dalam kegiatan-kegiatan HTI dalam kurun waktu 2016 sampai 2018.
3. Informan bersedia memberikan informasi yang memadai bagi penelitian.

Dari tiga kriteria yang telah ditentukan di atas peneliti mendapatkan Tujuh orang yang dianggap sesuai untuk dijadikan sumber informasi. Tujuh informan tersebut ialah :

1. NF (36 tahun). Informan merupakan mantan pengurus DPW HTI Jawa Timur. Hingga penelitian ini dilakukan NF masih aktif mengisi berbagai kegiatan (seminar, diskusi publik) yang diselenggarakan oleh aktifis hti.
2. BY (24 tahun). Informan adalah anggota hti surabaya. Informan aktif dalam kegiatan halaqoh yang dilakukan hti.
3. ZA (22 Tahun). Informan merupakan simpatisan HTI. informan juga merupakan pengurus PW GEMA pembebasan. Salah satu organisasi yang mendukung gagasan khilafah islamiah.
4. AR (27 Tahun). Informan merupakan anggota HTI yang juga pengurus PW GEMA pembebasan. AR Aktif menyuarakan tentang khilafa islamiah melalui akun media sosialnya.

5. JAI (23 Tahun). Informan adalah simpatisan HTI yang juga aktifis GEMA pembebasan.
6. MHN (23 Tahun). Informan merupakan anggota HTI yang pada saat penelitian ini dilakukan bertugas sebagai musrif atau pemimpin halaqoh.
7. TSP (22 Tahun) informan merupakan simpatisan HTI

Tabel I.2  
Profil Informan

NO	Nama	Jenis kelamin	Usia	Status
1	NF	Laki-laki	36	Pengurus DPW HTI Jawa Timur
2	BY	Laki-laki	24	Anggota HTI
3	ZA	Laki-laki	22	Simpatisan HTI dan Pengurus Wilayah GEMA Pembebasan Jawa Timur
4	AR	Laki-laki	27	Anggota HTI dan Pengurus Wilayah GEMA Pembebasan Jawa Timur
5	JAI	Perempuan	23	Anggota HTI
6	MHN	Laki-laki	23	Simpatisan HTI
7	TSP	Laki-laki	22	Anggota HTI

### I.6.5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan menggunakan *interview guide*. Pengumpulan data didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan yang berasal dari subyek penelitian dan berisi tentang pengalaman, pendapat, dan perasaannya mengenai renegosiasi identitas HTI. Kedua, Pengumpulan data dilakukan melalui *Observasi*, dimana observasi dilakukan pada saat peneliti turut berpartisipasi langsung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HTI, observasi juga dilakukan pada media sosial yang digunakan oleh mereka. Ketiga, Pencatatan. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti membuat catatan tentang apa yang dilihat dan didengar secara tidak sengaja.

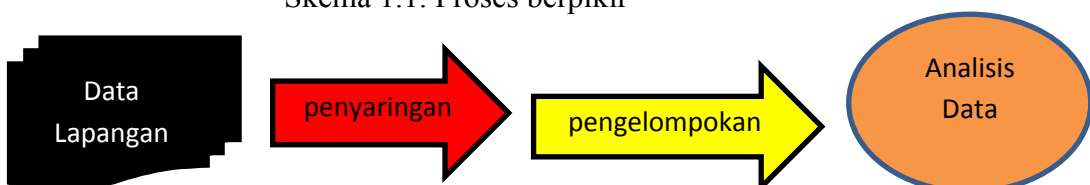
### I.6.6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data etnografi David M. Fetterman. Dimana metode ini mencakup beberapa langkah. Berpikir, Triangulasi, Pola, peristiwa kunci, pemetaan, diagram alur (*flow chart*), Diagram Organisasi (*Organizational Chart*), analisis konten, Kristalisasi.<sup>25</sup>

#### I.6.6.1. Berpikir

Pada tahap ini peneliti melakukan penyaringan. Memilih dan mengisolasi data yang didapatkan pada proses pengumpulan data. Pemelihan dan pengisolasian, dilakukan dengan berpegang pada berbagai macam model dan teori, yang digunakan sebagai landasan untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, peneliti kemudian mengolah, mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut.

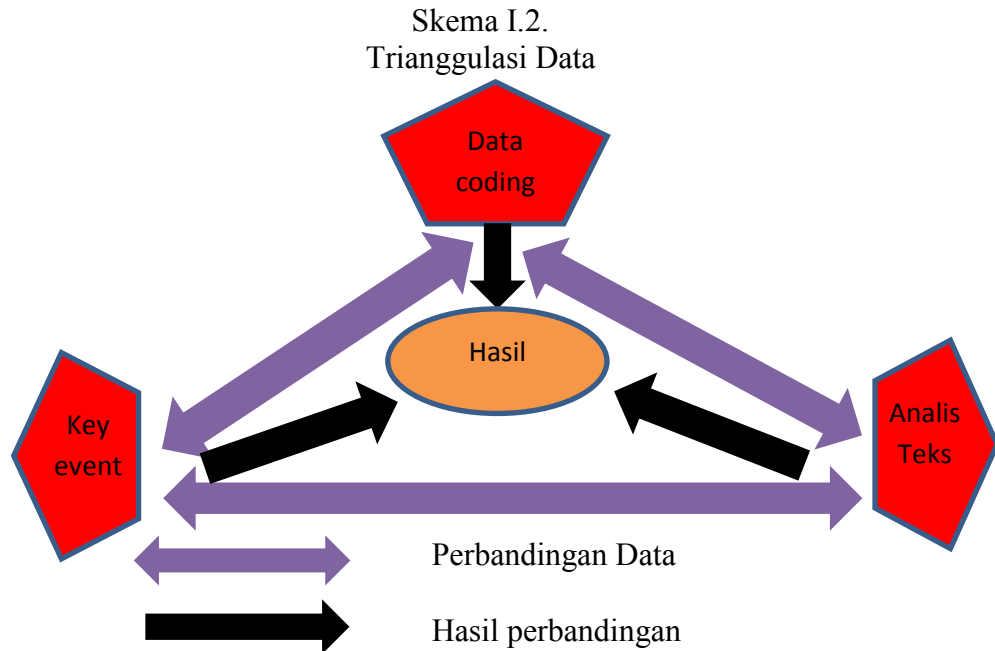
Skema 1.1. Proses berpikir



<sup>25</sup> David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step*, Third Edition, Thousand Oaks, California, Sage publications, Inc., 2010, hlm. 93-112

### I.6.6.2. Trianggulasi

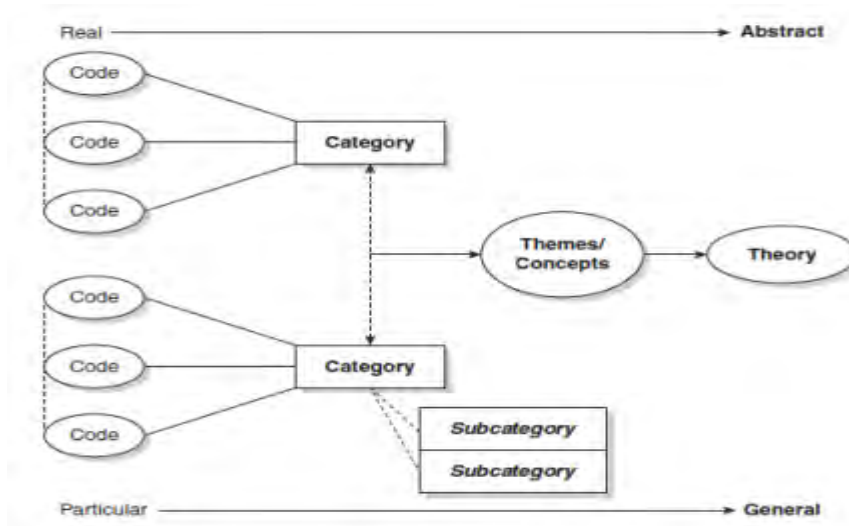
Merupakan analisis dasar dalam penelitian etnografi, digunakan untuk membandingkan data dalam rangka untuk menguji kualitas informasi yang diperoleh. Data-data yang telah dikelompokkan dalam proses koding, peristiwa kunci dan analisis konten. kemudian dibandingkan dalam triangulasi.



### I.6.6.3. Pola atau coding

Digunakan untuk melihat pola pemikiran dan perilaku dengan membandingkan, mempertentangkan kemudian menyortir kategori-kategori kasar dan hal-hal kecil sehingga dapat dipahami dan diidentifikasi. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan koding terhadap informasi yang didapatkan dari informan. Johnny saldana dalam bukunya *The coding manual for qualitative researchers* mengungkapkan. Coding merupakan proses untuk memperoleh kode berupa frasa pendek, sebagai esensi bagian tertentu. Coding data Kualitatif terdiri dari dua tahap. *First Cycle Coding* dan *Second Cycle Coding*. Seperti terlihat dalam gambar berikut.

Skema I.3.  
Jalur Koding

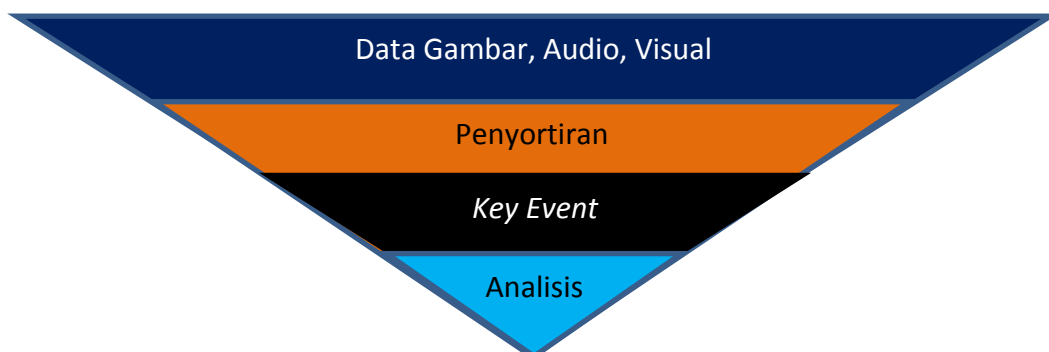


Sumber : Johnny Saldana, *The coding manual for qualitative researchers*, Thousand Oaks, California: Sage Publications Ltd, 2009, hlm. 12.

**I.6.6.4. Peristiwa kunci (Key Event)**

Peristiwa kunci yang merupakan metafora dari cara hidup dan nilai-nilai sosial tertentu. Tahapan untuk menemukan peristiwa kunci terkait penelitian ini, telah di dokumentasikan. dokumentasi seperti foto dan video secara kongkrit menyampaikan banyak informasi, yang oleh peneliti kemudian dilakukan proses analisis terhadap dokumentasi tersebut.

Skema I.4.  
Menemukan Key Event

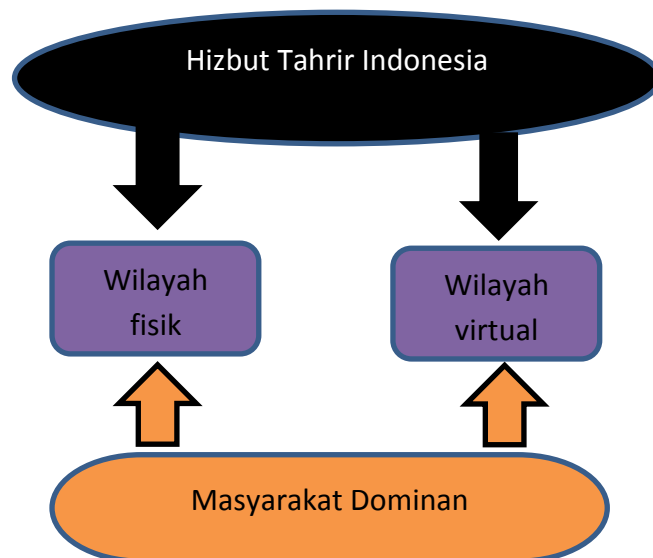




### I.6.6.5. Pemetaan

Digunakan untuk mendapatkan gambaran Area dari organisasi yang akan dijadikan penelitian. juga untuk mereduksi dan meringkas realitas sehingga dapat ditangani oleh peneliti. Pada penelitian ini meliputi wilayah Fisik dan Virtual. Wilayah fisik yang diteliti dalam penelitian ini adalah wilayah kota surabaya diamana oraganisasi yang akan diteliti berada. wilayah virtual dalam penelitian ini meliputi media sosial Facebook, Instagram, youtube, blok dan web site. Yang dikelola oleh HTI. pemetaan pihak terkait dalam penilitian ini adalah HTI, Masyarakat dominan.

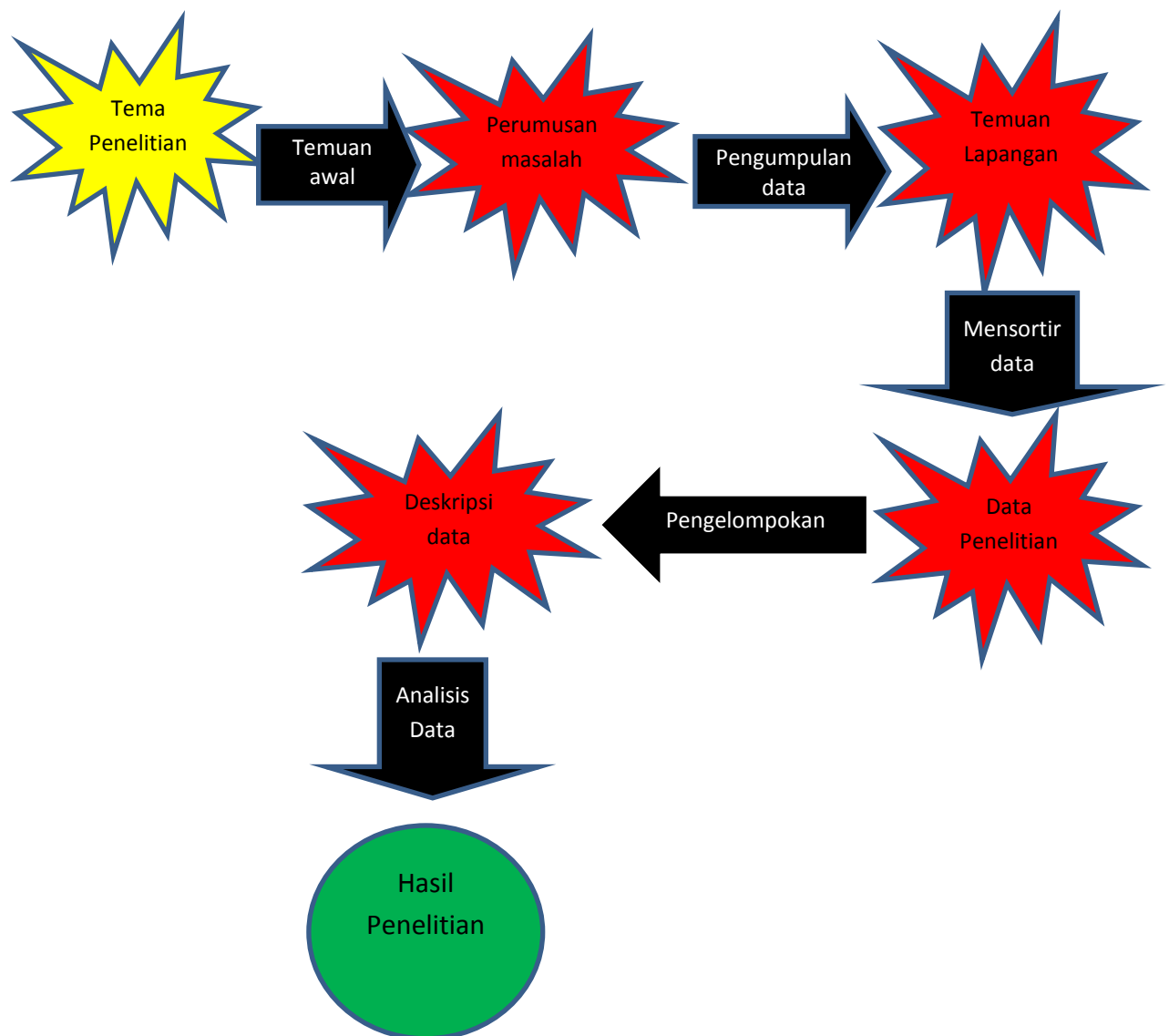
Skema I.5.  
Pemetaan Wilayah Penelitian



#### I.6.6.6. Diagram alur (Flow chart)

Merupakan gambaran yang dibuat secara jelas dan ringkas tentang proses yang dilakukan dalam penelitian, yang kemudian dipergunakan untuk menyortir data yang dimiliki sehingga sesuai dengan realitas yang ada. Peneliti melakukan serangkaian kegiatan seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

Skema I.6.  
Diagram Alur (flow chart)



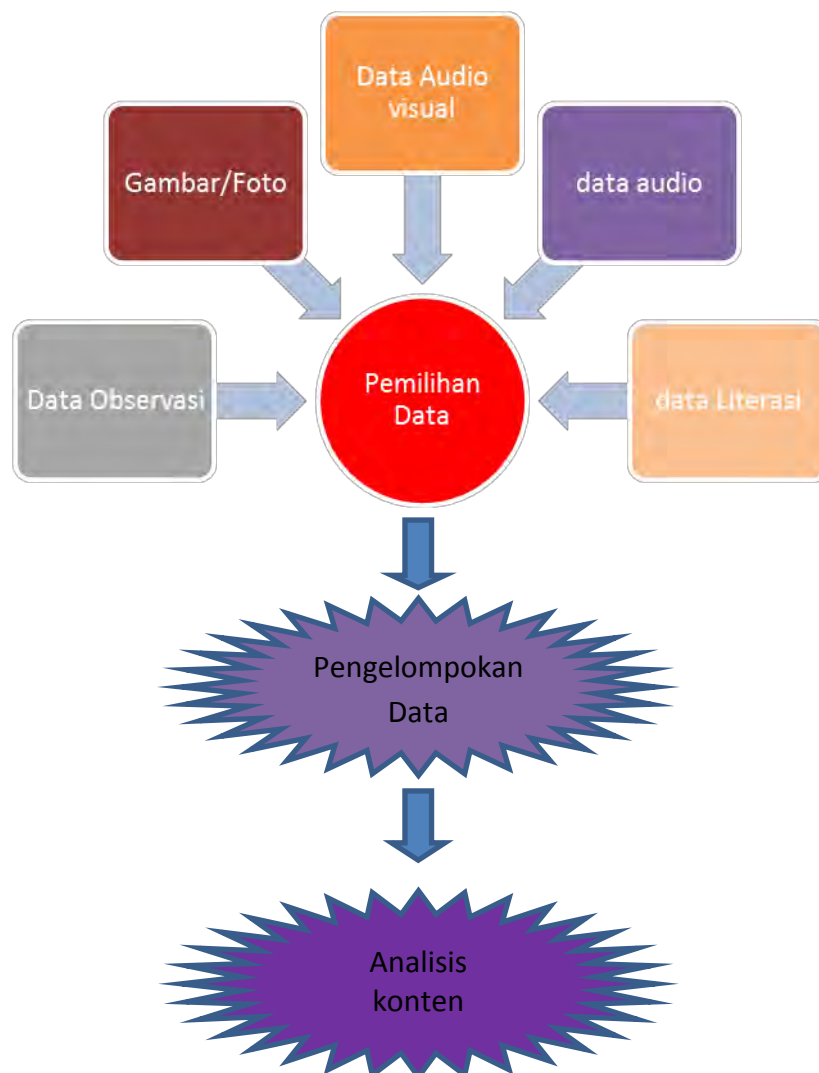
### I.6.6.7. Diagram organisasi (Organizational Chart)

Diagram organisasi digunakan untuk memberikan gambaran tentang struktur yang ada dalam organisasi yang sedang diteliti. Dalam hal ini berguna untuk mengetahui alur komunikasi yang terjadi dalam organisasi tersebut.

### I.6.6.8. Analisis konten

Tahapan ini menuntut peneliti untuk menganalisis setiap dokumen yang didapatkan pada saat dilapangan. Ini berfungsi untuk memperoleh data yang sesuai dari dokumentasi penelitian. selanjutnya data tersebut dibandingkan dan ditabrakkan, sehingga peneliti memperoleh gambaran dalam penelitian.

Skema I.7.  
Analisis Konten



### I.6.6.9. Kristalisasi

Langkah terakhir dalam analisis etnografi Fetterman adalah kristalisasi data. Data yang telah dianalisis pada tahapan sebelumnya, peneliti kemudian membaca kembali seluruh data dan hasil analisis yang dilakukan, untuk kemudian dapat dituliskan sebagai hasil penelitian.

Skema I.8.  
Kristalisasi Data

